

**GERAKAN LINGKUNGAN DAN PARTAI POLITIK: STUDI TENTANG
PERJUANGAN WALHI DALAM PEMBENTUKAN PARTAI HIJAU INDONESIA**

Irhash Ahmady¹, Ari Ganjar Herdiansah², Husin Al-Banjari³
¹Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
^{2,3}Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
E-mail: irhash19001@unpad.ac.id

Abstrak

Pendirian Partai Hijau Indonesia (PHI) dipandang sebagai kemajuan penting dari *green politics*, suatu gerakan dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan yang berakar pada pelestarian lingkungan, keadilan sosial tanpa kekerasan, dan demokrasi kerakyatan/akar rumput. Artikel ini menganalisis peran dari organisasi gerakan lingkungan, yang dalam konteks ini adalah Wahala Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam mendorong pembentukan PHI yang melibatkan kontestasi ideologi lingkungan di internal WALHI. Penelitian ini dibangun menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh WALHI, PHI, dan studi dokumentasi terkait proses pendirian PHI. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendirian PHI oleh WALHI berasal dari pemikiran persoalan lingkungan yang terintegrasi dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Buruknya produk politik dalam urusan tata kelola lingkungan menjadi dasar dan strategis untuk memperkuat *green politics* di Indonesia. Proses politik tersebut diharapkan melahirkan tata kelola lingkungan yang mengusung nilai-nilai *sustainability*. Dalam pendirian PHI, WALHI berperan sebagai kelompok kepentingan yang tidak memilih untuk melebur menjadi partai politik. Konsistensi WALHI dalam mempertahankan kedudukannya sebagai organisasi non pemerintah membuat mereka lebih leluasa dalam melakukan kerja-kerja *green politics*. Namun, proses tersebut telah melalui serangkaian kontestasi ideologi di kalangan internal WALHI terutama di antara kelompok pro politik praktis dan kelompok pro gerakan lingkungan.

Kata kunci: Politik Hijau, Partai Hijau Indonesia, WALHI, Gerakan Lingkungan

Abstract

The establishment of the Indonesian Green Party (PHI) is an essential advancement of green politics in Indonesia. This movement creates a sustainable living system rooted in environmental conservation, non-violent social justice, and grassroots democracy. This article analyzes the role of the environmental movement organization, which in this context is Wahala Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), in encouraging the formation of the PHI, which involves ideological contestation within WALHI. This research was built using a qualitative approach with a critical paradigm. Data were obtained through interviews with the activists of WALHI and PHI and documentation studies related to establishing the PHI. The results of this study reveal that the establishment of the PHI by WALHI stems from the thought of environmental issues that are integrated with politics, economy, society, and culture. Poor political products in ecological governance have become the basis and strategy for strengthening green politics in Indonesia. The political process is expected to birth ecological management that carries the values of sustainability. In establishing the PHI, WALHI acted as

an interest group that did not choose to merge into a political party. WALHI's consistency in maintaining its position as a non government organization makes them more flexible in carrying out green politics work. However, the process has gone through a series of ideological contestations within WALHI's internal circles, especially between pro-political and pro-environmental movement groups.

Keywords: Green Politics, Indonesian Green Political Party, WALHI, Environmental Movement

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya kesadaran kolektif *public* maka isu lingkungan meluas menjadi isu global. Secara politik *stakeholder* pada masa lalu menganggap isu lingkungan sebagai persoalan lokal semata, meskipun kenyataannya masalah lingkungan adalah persoalan global. Pada pertemuan-pertemuan skala global, misalnya pada forum *United Nation*, pembicaraan tentang pentingnya agenda penyelamatan lingkungan semakin mengemuka. Dalam pertemuan G20 yang secara khusus membahas ekonomi, isu lingkungan menjadi arus utama khususnya masalah perubahan iklim (Newell, 2019). Bahkan dalam isu pertahanan, Amerika Serikat menyatakan bahwa ancaman terbesar negara di dunia termasuk Amerika adalah perubahan iklim (Triana, 2021).

Di Indonesia, gerakan lingkungan baru lahir pada dekade 1980-an. Diawali dengan isu ekonomi yang mengalami *booming* diikuti oleh krisis lingkungan yang menjadi perhatian global (Hadiz & Robinson, 2004). Kondisi ini ditandai oleh dua hal, pertama lahirnya UU Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982 yang kemudian melahirkan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Kedua lahirnya sebuah organisasi forum yang dikenal dengan nama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 15 Oktober 1980 sebagai forum komunikasi LSM yang bergerak pada advokasi kebijakan lingkungan hidup (WALHI, 2022).

Pada akhir tahun 1970an sudah ada aktivisme NGO lingkungan dengan masuknya NGO internasional di Indonesia, seperti World Wildlife Fund (WWF) (Wu, 2020). Namun, lembaga internasional tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan WALHI, kebanyakan NGO Internasional lebih fokus pada konservasi lingkungan khususnya penyelamatan (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016). Gerakan lingkungan pada awal gerakan memiliki kecenderungan anti politik, hanya mengkampanyekan gaya hidup (*lifestyle*) dan perubahan perilaku individu agar lebih ramah lingkungan. Sekali-sekali gerakan tersebut menjadi

kelompok penekan dalam bentuk aksi demonstrasi hingga lobi-lobi politik (Barry, 1994). Perkembangan WALHI kemudian memunculkan kesadaran untuk membangun partai politik yang memiliki visi mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, terutama sejak munculnya gerakan reformasi 1998 dan kejatuhan Orde Baru. Jacobs (1997:1) menyebut *environmentalisme modern* kemudian muncul tidak hanya “peduli” namun sudah menjadi gerakan politik yang penuh dengan kesadaran ideologi (Carter, 2007).

Perubahan struktur politik di Indonesia pasca rezim Orde Baru mendorong lahirnya banyak partai politik (Ufen, 2011). Euforia kebebasan politik tersebut membuka ruang munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang selama masa Orde Baru tidak dimungkinkan terjadi. Terjadi perubahan mendasar dari aktivitas politik negara industri yang mengubah isu dan agenda politik yang dominan turut mendorong perubahan pola gerakan lingkungan. Perubahan tersebut telah menyebabkan perpecahan partai politik dan menimbulkan aliran politik baru. Situasi ini menyebabkan sistem kepartaian ditata ulang dengan mengantikan dengan partai politik baru (Carter, 2007). Di sejumlah negara, lahirnya partai politik hijau berbarengan dengan munculnya kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan. Di Indonesia pun demikian. WALHI berupaya mendirikan Partai Hijau, meski WALHI dan sejumlah lembaga lingkungan lainnya pada tahun 1999 memutuskan untuk menunda pendirian partai politik (Ensiklopedia Dunia, 2022).

Perjuangan WALHI dalam mendorong *green politics* tidak berhenti pasca pemilu pertama tahun 1999. Mereka kemudian membentuk Badan Pekerja Persiapan Pembangunan Organisasi Politik Kerakyatan (BP3OPK) pada 4 Maret 2005 (Khoiruddin, Puri, & Akmalie, 2018). Terakhir pada 5 Juni 2012 sejumlah petani, buruh, dan aktivis lingkungan yang diinisiasi oleh Chairil Syah dkk mendeklarasikan Partai Hijau Indonesia (PHI) di Bandung. Terlibat juga pada deklarasi tersebut jaringan Serikat Pekerja Progresif, jaringan WALHI Internasional, dan Serikat Hijau Indonesia (Bolqiah & Raffiudin, 2020). Struktur kesempatan politik yang ada turut memudahkan berbagai kelompok tersebut dalam mendorong agenda politiknya masing-masing. Tetapi kemudian terjadi aliansi berdasarkan kapasitas aktor-aktor yang menghendaki perubahan politik. Selain itu, konstelasi elite yang berkuasa dimanfaatkan oleh aktor-aktor gerakan, di mana Zald (1996) menyebut kondisi tersebut sebagai prasyarat terciptanya struktur kesempatan politik (MacAdam, McCarthy, dan N.Zald (ed), 1996).

Pendirian PHI dipandang sebagai kemajuan penting dari gerakan *green politics*. Istilah *green politics* merujuk pada sebuah pandangan politik yang bertujuan untuk menciptakan

masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang pada dasarnya berakar pada lingkungan, keadilan sosial tanpa kekerasan dan juga demokrasi akar rumput. *Green politics* muncul karena isu-isu lingkungan dan kerusakan alam seperti pemanasan global, pengundulan hutan dan rusaknya ekosistem makhluk hidup semakin tidak terbendung. Prinsip dari *green politics* memandang bahwa terdapat empat struktur penyebab utama krisis lingkungan hidup dan munculnya rezim lingkungan internasional dalam mengelola sumber daya alam, yakni sistem negara-bangsa, kapitalisme, ilmu pengetahuan dan patriarki (Geus, 2010). Selain itu, menguatnya liberalisme pasca perang dingin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan secara berlebihan turut membangkitkan semangat perlawanan dari *green politics* (Wahyudin, 2020).

Dobson memiliki dua definisi tentang karakteristik *green politics*. Pertama, mereka menolak antroposentris yang menganggap manusia sebagai subyek utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, menegaskan bahwa batasan pertumbuhan sangat diperlukan karena menjadi penyebab krisis lingkungan (Carter, 2007). Pengalaman dari pertumbuhan ekonomi eksponensial selama dua abad terakhir menunjukkan bahwa penyebab dari kerusakan lingkungan menjadi tujuan hadirnya *green politics* sebagai solusi (Hutabarat, 2022). Berbeda dengan antroposentrisme, *green politics* menempatkan manusia sebagai bagian dari alam dan oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban untuk melestarikan lingkungan.

Upaya gerakan WALHI dalam mendorong lahirnya institusi politik merupakan upaya membangun kesadaran kolektif kelompok masyarakat dalam merubah kebijakan politik sosial yang ada. Manuel Castells menyebut gerakan tersebut sebagai bagian dari strategi gerakan politik lingkungan global. Dalam buku berjudul “*The Power of Identity*” (1996) menjelaskan bahwa terdapat empat mazhab politik lingkungan yang digunakan dalam gerakan politik lingkungan (Castells & Himanen, 2011); Pertama, gerakan instrumental (*the instrumental movement*), sebuah gerakan berkarakter reformis dengan tipologi gerakan; (a) konservasionis (*convervationist*) merupakan gerakan perlindungan alam dalam satu kawasan tertentu. (b) Pengkampanye kebijakan (*the policy campaigners*) gerakan mempengaruhi kebijakan public terkait lingkungan. (c) Mobilisator (*the mobilisers*) merupakan gerakan pengorganisir public untuk melakukan aksi protes lingkungan kepada pemegang otoritas dan atau pelaku bisnis yang merusak lingkungan. David Snow menyebut sebagai gerakan yang menentang otoritas yang ada, tidak hanya secara institusi akan tetapi kultural (Snow & Bryd, 2007).

Kedua, gerakan kontra kultural (*the contra-cultural*), memiliki karakter radikal yang menentang setiap tindakan yang merusak lingkungan, Gerakan ini melihat kerusakan

lingkungan sebagai bagian bentuk dari praktik masyarakat yang konsumtif-kapitalistik, sangat teknokratik dan berskala besar. Gerakan terpengaruh oleh pemikiran eco-marxisme dan mempromosikan bentuk masyarakat yang cenderung sosialis, ekologis dan berskala kecil (Ku, 1996). *Ketiga* Gerakan sub-kultral (*sub-cultural*) tujuan yang lebih mempengaruhi perilaku dan sangat tidak independent dengan memberikan alternatif-alternatif cara hidup yang sinergi dengan alam. dua tipologi gerakan sub-kultural yakni; (a) gerakan edukasi untuk mendidik masyarakat segmen khusus seperti anak muda tentang permasalahan sampah, agar lebih ramah lingkungan dan peduli terhadap sekitar. (b) gerakan alternatif contoh (*the alternative-exemplistic*). Gerakan memberikan contoh langsung cara hidup dengan alternatif seperti menjalankan program zero waste dalam setiap kegiatan.

Pertautan perjuangan antara gerakan lingkungan dengan partai politik menarik untuk diteliti karena dapat memberikan pemahaman tentang peluang dan tantangan bagi gerakan lingkungan dalam struktur politik formal. Artikel ini mengkaji upaya WALHI dalam mendorong pembentukan Partai Hijau di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian ini antara lain mengapa WALHI sebagai NGO konsisten mendorong lahirnya PHI sementara secara institusi tidak merubah lembaga menjadi organisasi politik? Bagaimana kontestasi ideologi *green politics* di dalam WALHI yang mempengaruhi upaya pendirian PHI? Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyajikan analisis perjuangan gerakan lingkungan dalam mendorong lahirnya sebuah partai politik tetapi tidak melebur ke dalamnya. Selain itu, artikel ini juga menggambarkan terjadinya kontestasi ideologi *green politics* di internal yang mendorong WALHI terus memobilisasi dukungan bagi PHI.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan paradigma kritis, guna mengungkap fenomena tertentu beserta konteks spesifiknya. Paradigma kritis menuntut peneliti untuk melihat ragam pemikiran politik lingkungan yang berkembang dalam organisasi secara historis. Mengetahui maksud organisasi konsep 70% Politik, 30% regular, yang berelasi langsung dengan pemikiran *green politics* yang berkembang dalam organisasi hingga menuntut WALHI mendorong lahirnya PHI.

Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan yakni sepanjang Januari hingga Agustus 2021. Wawancara dilakukan pada aktivis dan tokoh seperti para direktur WALHI, anggota lembaga, jaringan lembaga SHI, PHI dan pengamat lingkungan lainnya yang terlibat

baik langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan Partai Hijau. Analisis diperkuat dengan data sekunder berupa: Manifesto politik WALHI, Resolusi pasca PNLH WALHI 2021, Tinjauan Lingkungan Hidup, Jurnal Tanah Air, Kertas Posisi dan paper brief WALHI.

Tema wawancara antara lain mendalami alasan WALHI mendorong Partai Hijau, keterlibatan informan secara langsung atau tidak langsung, program politik apa saja yang mencoba dilakukan WALHI dalam melakukan mendorong Partai dan gagasan *green politics*. Termasuk masa depan PHI sendiri dalam sistem demokrasi di Indonesia. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi informasi yang diberikan oleh para aktivis di kalangan mereka maupun terhadap studi dokumentasi yang relevan dengan WALHI dan pendirian Partai Hijau. Peneliti menganalisis dan melakukan perbandingan data yang diperoleh dari wawancara, jurnal, media dan catatan organisasi WALHI baik dari website maupun dari perpustakaan. Selain itu, transkrip hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti, diserahkan terlebih dahulu kepada para informan untuk diverifikasi ulang guna meminimalisir kesalahan tafsir peneliti dan bias atas data yang disampaikan oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendorong Pendirian Partai Hijau Indonesia (PHI)

Munculnya gagasan untuk mendirikan PHI di tubuh WALHI tentu mempunyai latar belakang dan berbagai alasan yang mendorongnya. Secara eksternal perubahan politik di Indonesia ketika Orde Baru yang otoriter berakhir pada tahun 1998. Momentum yang dimanfaatkan oleh masyarakat sipil menyambut *euphoria* demokrasi. Pamungkas (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga kelompok besar partai yakni partai yang mengambil basis kelas, partai yang jalur aliran, dan partai yang mengambil persilangan diantara keduanya yang bersifat *catch all* (Prasty & Adiputra, 2016).

Namun secara spesifik lahirnya PHI didasari atas dua kondisi, *pertama* meningkatnya kesadaran di kalangan aktivis WALHI tentang pemikiran *green politics*. *Kedua* berkembangnya pemikiran gerakan lingkungan untuk merubah kebijakan politik terhadap lingkungan. Dalam dokumen Manifesto Politik WALHI (WALHI, 2021) dijelaskan bahwa gerakan lingkungan perlu mencari ranah perjuangan baru untuk memperoleh dukungan publik yang semakin meluas. Oleh karenanya satu wadah dalam kerangka kebijakan lingkungan, partai politik dibutuhkan untuk mengakselerasi agenda *green politics* tersebut.

Agenda *green politics* sebenarnya sudah mengemuka sejak awal berdirinya WALHI, tetapi baru dalam sebatas wacana belum serius dalam merancang format partai politik seperti

PHI. Wacana pembentukan partai politik muncul didasari anggapan bahwa kegiatan advokasi kebijakan lingkungan dari rentang tiga dekade (1989-2019) dirasa belum memiliki daya tekan dalam mempengaruhi kebijakan politik negara baik pihak eksekutif maupun legislatif. Pemikiran tentang lingkungan adalah bagian dari politik, ekonomi, sosial budaya menguat seiring dengan terbukanya pemikiran dan peluang kebebasan berdemokrasi di Indonesia (Rani, 2013). Para aktivis WALHI berpandangan bahwa dengan mendorong terbentuknya PHI, agenda *green politics* lebih mudah diintervensi dalam kebijakan negara.

Kegigihan WALHI dalam mendorong terbentuknya PHI sesuai dengan karakteristik fenomena gerakan sosial baru (*new social movement*). Terdapat dua indikasi yang menandai gerakan sosial baru. Pertama, adanya kelas sosial baru yang merupakan kalangan profesional terdidik yang berada lama masyarakat industri. Kedua, kelompok minoritas yang tumbuh di tengah masyarakat industri yang memegang prinsip persamaan hak, kualitas lingkungan yang baik, gaya hidup alternatif atau biasa dikenal dengan nilai *post-material* (Carter, 2007). Kelas sosial baru ini merupakan sebuah kelas menengah baru yang berbeda pendekatan dengan kelas sosial ala Karl Marx, sebagaimana pernyataan Capra & Spretnak (1984 dalam Carter, 2007) bahwa “*We are neither left nor right. We are in front.*”

Pembentukan PHI juga dilatarbelakangi kekecewaan terhadap partai-partai yang ada yang tidak pernah serius dan konsisten mendorong agenda *green politics*. Meskipun beberapa partai politik telah memiliki visi menjaga lingkungan, tetapi mereka tidak menjadikan agenda tersebut sebagai prioritas. Karena itu, para aktivis WALHI menganggap perlunya mendorong partai politik alternatif yang memperjuangkan isu lingkungan dengan sungguh-sungguh (Bolqiah & Raffiudin, 2020). Isu lingkungan hanya menjadi pembicaraan pada masa kampanye tapi tidak sampai pada level kebijakan yang pro lingkungan. Hal ini dapat dilihat kerusakan lingkungan terus saja terjadi akibat kebijakan politik lingkungan yang tidak berkelanjutan (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016).

Dalam mendorong pembentukan PHI, terjadi proses politik di internal WALHI. Di antaranya melalui hasil musyawarah empat tahunan WALHI atau biasa dikenal dengan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Sebagai forum tertinggi, PNLH memiliki peran besar dalam menentukan berbagai keputusan membentuk Badan Pekerja Persiapan Pembangunan Organisasi Politik Kerakyatan (BP3OPK) sebagai langkah awal dalam kerja-kerja mendorong massa dalam pembentukan PHI. Dengan kerja blok politik BP3OPK, posisi PHI dan organisasi WALHI memiliki hubungan saling dukung. Meski dalam gagasan *green*

politics WALHI berkewajiban memandu pembentukan inti gagasan ideologi dan memberi akomodasi dalam pembentukan struktur partai. Karena itu, walaupun secara organisasi WALHI dengan PHI tidak memiliki hubungan, tidak dapat dipungkiri bahwa PHI merupakan buah dari pemikiran para aktivis WALHI. Setelah berdirinya PHI, maka posisi PHI lebih independen dalam hal penanganan dan kompromi kebijakan. Apalagi dalam urusan politik, WALHI menyerahkan sepenuhnya kepada PHI.

Konsistensi WALHI Sebagai Organisasi Non Pemerintah

Sebagai organisasi lingkungan, WALHI memiliki keistimewaan dibanding organisasi masyarakat sipil lain dalam hal jaringan dan jumlah anggota tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dengan keistimewaan tersebut, akan sangat mudah bagi WALHI untuk mendirikan partai politik dan mengikuti pemilihan umum. Secara organisasi, WALHI telah memiliki cabang di seluruh provinsi yang memungkinkan mereka memiliki pengurus di daerah. Dari hitung-hitungan persyaratan pendirian partai politik, di mana paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota, telah mamadai bagi WALHI untuk bertransformasi menjadi partai politik.

Meskipun memiliki kapasitas organisasi yang layak, WALHI tidak serta merta melebur menjadi sebuah partai politik. Pilihan ini disebabkan pertimbangan bahwa posisi NGO akan lebih mudah dan bebas memberikan kritik dan masukan dalam posisi setara dengan relasi kekuasaan tanpa ada konflik kepentingan. Menurut Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni (2016), organisasi non-pemerintahan memainkan peran sebagai gerakan sosial yang mendorong kesetaraan relasi kuasa dengan mempengaruhi kebijakan, penegakan hukum, perilaku pasar dan sektor swasta, serta mempromosikan pengelolaan lahan berbasis masyarakat pada tingkat lokal, dalam rangka penguatan tata kelola sumber daya alam di Indonesia (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016). Tetap menjadi NGO juga menguntungkan bagi WALHI dalam menjalankan pengawasan negara dalam setiap kali pengambilan keputusan politik terkait lingkungan.

Keputusan WALHI untuk konsisten berjuang di jalur gerakan lingkungan sejalan dengan karakteristik organisasi masyarakat sipil yang progresif. Menurut Clack (dalam (Halili, 2009), organisasi masyarakat sipil progresif cenderung menjadikan pemerintah sebagai bagian dari masalah, sebab pemerintah senantiasa dikuasai elite, bias negara maju, korup, dan anti pemberdayaan. Persepsi itu menempatkan masyarakat sipil sebagai “mestinya berseberangan”

dengan pemerintah. Dalam cara pandang ini, ada tiga opsi pilihan bagi organisasi gerakan lingkungan: oposisi terhadap pemerintahan, penyempurnaan, atau melakukan perubahan. Meskipun ketiga opsi pilihan tersebut dilakukan semua oleh WALHI namun cara pandang oposisi terhadap pemerintahan lebih dominan hingga hari ini.

Gramsci (dalam (Simon, 2004) memisahkan konsep *civil society* di satu sisi dan negara di sisi lain. Menurut Gramsci *civil society* pada dasarnya melawan hegemoni negara, bahwa apa yang disebut organisasi-organisasi 'swasta' (*private*) dengan masyarakat politik yang disebut negara. Dalam beberapa paragraf pada *prison notebooks* Gramsci mengatakan bahwa masyarakat sipil itu adalah masyarakat etika atau moral, karena dalam masyarakat sipil-lah hegemoni kelas dominan itu dibangun melalui mekanisme perjuangan politik dan ideologis. Pemikiran ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh WALHI, bahwa organisasi-organisasi masyarakat sipil dan negara harus mempunyai jarak yang jelas, hal ini dilandaskan oleh pemikiran bahwa NGO mempunyai peran sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan negara yang memiliki sifat bebas, independen dan terbebas dari *moral hazard* yang biasa melekat pada penyelenggaraan negara maupun politik. Sebagai organisasi lingkungan tentu WALHI mempunyai dasar-dasar etika atau moral yang melekat pada perjuangan politik dan ideologis WALHI dalam memperjuangkan agenda-agenda lingkungan.

Keputusan WALHI untuk konsisten di jalur gerakan atau masyarakat sipil sejalan dengan konsepsi Gramsci tentang posisi organisasi masyarakat sipil terhadap negara. Gramsci dalam (Simon, 2004) menjelaskan bahwa hubungan sosial yang membentuk masyarakat sipil berbeda dengan hubungan produksi aparat-aparat yang membentuk negara. Masyarakat sipil adalah suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi-kerakyatan. Jadi, masyarakat sipil adalah wadah kelompok sosial yang dominan mengatur konsensus dan hegemoni. Masyarakat sipil juga merupakan suatu wadah di mana kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (*subordinate*) dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternatif-hegemoni tandingan (*counter-hegemony*). Berkaitan dengan hal ini, WALHI sebagai sebuah organisasi kerakyatan akan kehilangan legitimasinya apabila masuk ke dalam pertarungan yang terdapat pada sistem politik negara. Selain itu, WALHI juga akan dihadapkan dengan potensi kehilangan massa yang sebagian besar adalah kalangan independen yang memisahkan kegiatan advokasi dan politik praktis. WALHI yang dimaknai sebagai tempat perjuangan untuk kelompok-kelompok yang Gramsci sebut *subordinate* juga akan lebih condong akan menghimpun kelompok elite dan kelas pemilik modal apabila bertransformasi menjadi partai politik.

Kontestasi Ideologi *Green Politics* di Internal WALHI

Setiap organisasi memiliki seperangkat nilai dasar atau ideologi sebagai panduan dalam menjalankan organisasi. Demikian juga WALHI sebagai NGO lingkungan. Dengan nilai dasar keterbukaan, WALHI tidak tertutup dengan kelompok anggota memiliki spektrum politik lingkungan tertentu saja. Bahkan WALHI menerima komunitas masyarakat yang berlatar belakang organisasi gerakan menjadi anggota lembaga. Kondisi ini berkonsekuensi kepada kontestasi ideologi *green politics* dalam tubuh WALHI. Terdapat para aktivis lembaga cenderung meletakkan institusionalisasi gerakan sebagai syarat advokasi dan kampanye, dimana korban lingkungan sebagai sumberdaya yang dimobilisasi untuk memperkaya gerakan dan advokasi (Gunawan, Tachya, & Herdiansah, 2015). Dinamika kelompok yang memiliki pemikiran seperti ini dilekatkan pada idiom DAS Kapital (sebuah buku yang berisi suatu pembahasan yang mendalam tentang ekonomi politik yang ditulis oleh Karl Marx). Castell menyebut gerakan ini sebagai instrumental dengan tipologi mobilisator (Castells & Himanen, 2011).

Adapun kelompok kedua adalah anggota yang percaya bahwa *green politics* melalui gerakan-gerakan kultural/pendidikan dapat membentuk kesadaran dan perilaku peduli lingkungan pada masyarakat. Salah satu contoh penerapan prinsip *green politics* semacam itu adalah pada kasus advokasi atau pendampingan WALHI pada isu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, aliran sungai yang membentang dari hulu Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bekasi yang kondisi ekologisnya terus terdegradasi. Menurut kelompok DAS Citarum, meningkatnya kesadaran dan meluasnya perilaku peduli lingkungan tersebut akan secara langsung berdampak pada berkurangnya dampak lingkungan dari aktivitas manusia, serta diyakini akan berujung pada menguatnya aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Castell menyebut sebagai sebuah gerakan sub-kultural dengan tipologi gerakan edukasi dan perubahan perilaku (Castells & Himanen, 2011). Meskipun memiliki pandangan yang berbeda tetapi kedua kelompok tersebut tetap sepakat bahwa kebijakan lingkungan yang keliru dipengaruhi oleh aktivitas politik negara.

Kelompok DAS Kapital telah memiliki berperan besar dalam mendorong pembentukan dan ideologisasi *green politics* pada pendirian PHI. Penekanan adalah pada perubahan kebijakan melalui jalur politik sebagai strategi baru dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menurut Saleh (2022) tidak cukup hanya melakukan pendekatan advokasi kebijakan dan kampanye public dalam mendorong agenda *green politic*

dalam kebijakan negara (wawancara pribadi). Tidak sedikit perilaku masyarakat yang bijak dalam pengelolaan lingkungan justru tersingkir oleh kebijakan eko-developmentalists yang cenderung mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Pada masyarakat lokal sejatinya eksis pemikiran dan tindakan yang mampu menselaraskan kepentingan ekologis dan manusia/masyarakat.

Pemikiran dan tindakan yang condong pada prinsip eko-populis dipandang terbukti mampu menjaga lingkungannya dari kerusakan. Meskipun pemikiran dan tindakan tersebut sangat kuat dan bahkan menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal, namun eksistensinya dihadapkan pada ekspansi kebijakan eko-developmentalists. Ekspansi tersebut menjadi kontradiksi bagi masyarakat lokal dalam mempertahankan praktek baiknya dalam pengelolaan sumber daya alam (Mahyuni, Hamid, & Aulia, 2022, pp. 93-95). Oleh sebab itu, diperlukan gerakan yang mampu mengintervensi lahirnya kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang *sustainable*. Hal tersebut menjadi dasar argumentasi bahwa gerakan lingkungan tidak cukup hanya dengan gerakan sub kultural dengan merubah perilaku publik.

Kontestasi ideologi *green politics* dalam tubuh WALHI secara langsung mempengaruhi dorongan dan keberhasilan pembentukan PHI. Meski demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa WALHI menjadi spektrum bagi anggota dengan latar belakang ideologi politik yang berbeda-beda. Sejatinya WALHI meskipun tidak berubah menjadi partai politik namun telah mengusung konsep *green politics* dalam berbagai gerakan lingkungan dengan menggerakkan seluruh sumberdaya. Pemobilisasian menjadi bagian dari gerakan sosial berupa pemobilisasian politik formal seperti partai politik, lingkungan legal seperti NGO dan kelompok filantropi lainnya, serta jejaring informal dan ikatan personal. Fenomena tersebut sejalan dengan McCarthy (1993), bahwa mobilisasi sumber daya adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial yang melebur dalam aksi-aksi kolektif termasuk di dalamnya mempengaruhi taktik gerakan dan bentuk organisasi (Hakim & Kosandi, 2018).

Gerakan yang diusung WALHI merupakan bagian dari *green politics* yang benar-benar berorientasi pada usaha untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan bukan sebagai sarana untuk mendukung kepentingan politik tertentu. John Barry (1994) memperkuat argumentasi pemikiran *green politics* dengan memberikan tiga prinsip dasar diantaranya, yaitu distribusi (intergenerasional) keadilan; komitmen terhadap proses demokratisasi; dan yang terakhir adalah upaya untuk mencapai keberlangsungan lingkungan. Tiga prinsip utama tersebut

merupakan konsepsi yang mewakili makna dari pusat *green politics* dan menjadi garis politik gerakan environmentalis dan partai politik hijau di dunia (Barry, 1994).

Adapun Jacobs (1997) menjelaskan bahwa environmentalisme modern saat ini tidak hanya “peduli” namun sudah bertransformasi menjadi gerakan politik yang penuh dengan pertimbangan ideologi yang melatarbelakanginya (Jacobs, 1997). Hal ini selaras dengan kecenderungan di dalam tubuh WALHI yang memperlihatkan perbedaan pandangan berkaitan dengan wacana pembentukan partai hijau. Perbedaan ideologi dalam memandang bagaimana melaksanakan gerakan-gerakan environmentalisme modern yang saat ini berkembang dengan berbagai macam latar belakang ideologi.

Keterlibatan WALHI dalam mengawasi setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan problem lingkungan mengukuhkan posisi strategis WALHI sebagai NGO Lingkungan. Meskipun pada akhirnya sebagaimana kelompok politik hijau mendorong lahirnya PHI, namun WALHI sebagai lembaga yang independen tetap berada di posisi netral untuk untuk memperjuangkan masalah lingkungan. Partai Hijau sendiri diharapkan akan mengakomodir isu-isu yang lebih progresif, baik dalam kaitannya dengan isu lingkungan, ekonomi maupun hak asasi manusia. Untuk itu, perlu mengkampanyekan model pembangunan alternatif (Asgart, 2004) bukan dengan membendung dan bersifat anti pembangunan, tidak dengan berbalik arah untuk hidup sangat sederhana secara subsisten dan primitif.

KESIMPULAN

WALHI dalam upaya pendirian partai hijau didasari pada pemikiran bahwa persoalan lingkungan terintegrasi dengan persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diperkuat analisa objektif bahwa kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh produk politik. Gerakan *green politics* harus memiliki daya dan kekuatan (*power*) dalam mengintervensi secara langsung proses politik untuk melahirkan kebijakan tata kelola lingkungan yang mengusung nilai-nilai *sustainability*. Meski WALHI mendorong lahirnya PHI tetapi tetap mempertahankan kedudukannya sebagai organisasi masyarakat sipil agar tidak terseret pada *spectrum* politik kekuasaan, yang membuatnya lebih leluasa melakukan kerja-kerja *green politics*.

Karakteristik WALHI yang terbuka terjadi kontestasi ideologi *green politics* yang memberi ruang pada kelompok yang pemikirannya cenderung instrumental dimana meyakini bahwa pengorganisasian rakyat dan pendirian partai politik berkedudukan strategis dalam *green politics*. Sedangkan kelompok sub kultural meyakini bahwa masifnya gerakan pendidikan dan

kampanye alternatif cara hidup akan membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat memiliki kedudukan langsung dalam *green politics*. Meksi keduanya pemikiran memiliki pemahaman bahwa lingkungan sangat bereleasi langsung dengan politik ekonomi.

Dua kontestasi pemikiran tersebut turut andil dalam memberikan pengaruh dan dinamika terhadap dukungan dalam pembentukan PHI. Pengurus Eksekutif Nasional sebagai pemegang mandat utama pada akhirnya memiliki pendekatan berbeda akibat kontestasi pemikiran *green politics* tersebut. Seberapa dominan kedua ideologi *green politics* tersebut bertarung. Pada rentang 2005-2012, dalam dua kepengurusan WALHI Eksekutif Nasional penguatan pemikiran *green politics* dengan pendekatan instrumental dengan mobilisasi kelompok masyarakat korban lingkungan sangat kuat. Peran BP3OPK sebagai badan mendapat dukungan pendanaan dan ideologisasi *green politics* dalam persiapan pembentukan PHI hingga di deklarasikan pada tahun 2012. Sedang pada periode selanjutnya dukungan ideologisasi *green politics* PHI cenderung berjalan stagnan. Hal tersebut berdampak secara langsung kepada PHI sehingga tidak mampu berkontestasi pada pemilu 2024.

Kegagalan WALHI secara organisasi dalam mendorong PHI untuk mewakili gagasan *green politics* dalam arena perpolitikan nasional tentu memberikan dampak kepada WALHI dan gagasan *green politics* itu sendiri. Secara internal WALHI dan PHI tidak mampu menyelesaikan kontestasi ideologi internal termasuk di dalamnya strategi politik yang akan dibangun. Sementara publik khususnya masyarakat korban lingkungan sangat berharap hadirnya partai alternatif yang merepresentasikan kepentingannya mereka akan mengalami frustrasi. Pada saat bersamaan, sebagian besar kader-kader WALHI memilih masuk dan menjadi pengurus partai lain seperti Partai Nasdem, PDIP, Gelora dan lain sebagainya.

Melihat situasi ini, ada baiknya WALHI memikirkan ulang secara organisasi agenda *green politics* melalui PHI. Mandat organisasi yang ada sudah semestinya dikaji melihat posisi dan situasi politik hari ini. Keputusan organisasi mendukung PHI tidak menjadi beban sejarah ditanggung WALHI. Menunggu sampai PHI mampu menjadi partai politik yang berkiprah mewarnai politik Indonesia dengan gagasan *green politics*. Atau mencari alternatif lain yang lebih efektif dengan mendukung kader-kader yang sudah menjadi bagian kader partai politik lain sehingga agenda gerakan lingkungan dan gagasan *green politics* mampu mewarnai perkembangan politik di Indonesia.

REFERENSI

- Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Wahyuni, E. S. (2016). NGO's Roles and Strategies in the Environmental Politic Arena. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 210-216.
- Asgart, S. (2004). *Green Politics dan Gerakan Demokratisasi di Indonesia*. Retrieved from Neliti: <https://www.neliti.com/publications/406/green-politics-dan-gerakan-demokratisasi-di-indonesia>
- Barry, J. (1994). The Limits of the Shallow and the Deep: Green Politics, Philosophy, and Praxis. *Environmental Politics*, Vol 3 Pages 369-394.
- Bolqiah, L. H., & Raffiudin, R. (2020). Oligarchy Domination and The Absence of Green Political Party in Indonesia. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 19 No 2 Pages 151-167.
- Carter, N. (2007). *The Politics of the Environment*. . Cambridge: Cambridge University Press.
- Castells, M., & Himanen, P. (2011). *The Power of Identity*. The Information Society and the Welfare State.
- Diamond, J. (2005 and 2011). *Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive*. Penguin Books.
- Ensiklopedia Dunia*. (2022, Maret 23). Retrieved from Partai Hijau Indonesia: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Partai_Hijau_Indonesia
- Fitriani, C. A. (2020). Relasi Antara Institusi Pemerintah Dan Organisasi Masyarakat Sipil (Greenpeace, WWF Indonesia, YFCC Indonesia, WALHI). *Universitas Gadjah Mada*.
- Geus, M. d. (2010). The Ecological Restructuring of the State. In *Democracy and Green Political Thought*. Chapter 10.
- Gunawan, W., Tachya, M. R., & Herdiansah, G. A. (2015). Institusionalisasi Gerakan Lingkungan Dalam Menentang Rencana PLTSa di Kota Bandung. *Sosiohumaniora*, No 1 Vol17 (Pages 67).
- Hadiz, V., & Robinson, R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.
- Hakim, A. I., & Kosandi, M. (2018). Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Framing Process in Social Movement to Demand Special Autonomy in Yogyakarta 2010-2012. *AtlantisPress*, 163-173.
- Halili. (2009). Tantangan Kontemporer Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Hak Asasi Manusia. *CIVICS (Jurnal Kajian Kewarganegaraan)*, Vol 6 No 1.
- Huberman, M. d. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Hutabarat, G. F. (2022). Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi. *Jurnal Polinter*, Vol 7 No 2.
- Jacobs, M. (1997). Introduction: The New Politics of the Environment. *The Political Quarterly*.
- Khoiruddin, R., Puri, N. P., & Akmalie, R. (2018, November 20). *Mengenal Partai Hijau Indonesia*. Retrieved from Retorika.id: https://www.retorika.id/mild-report_2018-11-20_mengenal-partai-hijau-indonesia.html
- Ku, D.-W. (1996). The Structural Change Of The Korean. *Korea Journal of Population and Development*, 25(1), 155-180.
- Mahyuni, Hamid, I., & Aulia, S. (2022). *Masyarakat Gambut dan Praktek Baik Pengelolaan Sumber Daya Gambut*. Sleman: Komojoyo Press.
- Neuman, W. L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches In Social Works*. New York: Columbia University.
- Newell, P. (2019). Global Green Politics. *Global Green Politics*, Dauvergne 2016. 1–20
- Prastya, I. Y., & Adiputra, Y. (2016). Dinamika Demokrasi Elektoral (Studi tentang Sentimen Anti-Partai di era Reformasi). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 225-238.
- Rani, F. (2013). Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek). *Jurnal Transnasional*, 4(2), 870–880.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Snow, D., & Bryd, S. (2007). Ideology, framing processes, and Islamic terrorist movements. *Mobilization: An International Quarterly*, 12(2), 119-136.
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 1–34.
- Triana, N. (2021, 8 7). Retrieved from [kompas.id: https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/07/sambutan-joe-biden-dan-ancaman-tenggelamnya-jakarta](https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/07/sambutan-joe-biden-dan-ancaman-tenggelamnya-jakarta)
- Ufen, A. (2011). Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and “Philippinisation.”. *SSRN Electronic Journal*.
- Wahyudin, B. (2020). Ancaman Kenaikan Muka Air Laut Bagi Negara-Negara di Kepulauan Pasifik. *Review of International Relations*, Vol 2 No 1.
- WALHI. (2021). *Manifesto WALHI: Mempengaruhi Gerakan Lingkungan Hidup di Indonesia*. WALHI.

- Wu, F. (2020). Environmental movements in Asia. *Environmental Movements in Asia. Taylorfrancis*, 1–297. <https://doi.org/10.4324/9781315026862>.
- Zulfa, V., Max, M., Hukum, I., & Ilyas, I. (2016). Isu-Isu Kritis Lingkungan dan Perspektif Global. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 5(1), 29 - 40.